LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKjIP)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2021

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG
2021

K A T A P E N G A N T A R

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat asung kertha wara Nugraha-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB No. 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategik yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya Pejabat dan staf yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 sampai dengan penyusunan LKjIP ini.

LKjIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan mengingat sistem Akuntabilitas ini masih relatif baru diterapkan sehingga kendala-kendala yang dihadapi terutama kesiapan masing-masing unit dalam merumuskan indikator dan dalam pengumpulan data kinerja. Namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi nara sumber, untuk mendapatkan jalan pemecahannya. Mudah-mudahan Laporan Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk peyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya.

Kepala Dinas Koperasi,UKM, dan
Perdagangan Kabupaten Badung

I Made Widiana,S.Sos,M.Si
Pembina
NIP.19650310 198602 1 004

D A F T A R I S I

Halaman

KATA PENGANTAR …… i

DAFTAR ISI …….. ii

IKHTISAR EKSEKUTIF …….. iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang …….. 1

1.2.Gambaran Umum PD 2

1.3.Stuktur Organisasi 6

1.4.Ruang Lingkup..... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Kinerja ……..…….. 9

2.2. Indikator Kinerja Utama……...…….. 13

2.3. Perjanjian Kinerja …….. 15

2.4. Cascading …… 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja .....……... 17

B. Realisasi Anggaran .....…… 39

C. PENUTUP .....…… 40

- Lampiran - lampiran

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance).

LKjIP ini tentunya masih jauh dari sempurna, namun ini merupakan langkah baik dalam memenuhi amanat Perpres No. 29 tahun 2014 , tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yaitu Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014

Dari 3 tujuan, rata-rata capaian masing-masing tujuan adalah : tujuan 1 dengan capaian kinerja tujuan adalah 180,15 %, tujuan 2 dengan capaian kinerja tujuan 81,82 % dan tujuan 3 dengan capaian kinerjanya 99,56 % Dari 3 tujuan dengan 3 indikator rata-rata capaian kinerjanya 120,51 %

Dari 6 sasaran rata-rata capaian masing-masing sasaran adalah : Sasaran 1 dengan 3 indikator (dengan hanya 1 yang dipakai) capaian kinerja 601,72 %, Sasaran 2 dengan 2 indikator rata-rata capaian kinerjanya 99,93 %, sasaran 3 dengan 2 indikator rata-rata capaian kinerjanya 131,9 %, Sasaran 4 dengan 1 indikator rata-rata capaian kinerja 100 %, Sasaran 5 dengan 1 indikator rata-rata capaian kinerja 92,98 % dan Sasaran 6 dengan 1 indikator rata-rata capaian 99,56 %. Dari 8 (delapan) indikator diatas rata-rata capaian kinerjanya sebesar 140,01 %, dan dari hasil pengukuran terhadap 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif, dengan capaian fisik 100 % dengan realisasi keuangan 90,89 %.

Untuk Akuntabilitas keuangan tahun 2020 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung mengelola anggaran sebesar Rp. 12.136.004.819 yang terdiri dari Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 10.027.559.692 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.508.445.127 dengan realisasi Belanja tidak Langsung sebesar Rp. 9.405.747.867 (93,8 %) realisasi Belanja Langsung Rp. 1.602.624.525 (77,86 %), dengan rata-rata realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung 85,83 %.

B A B I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Badung sebagai salah satu institusi pelayanan publik di dalam melaksanakan pemerintahan di Kabupaten Badung dituntut untuk dapat menginformasikan kinerjanya secara berkala sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat masyarakat khususnya di Kabupaten Badung. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (good goverment) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) yang dilandasi oleh sistem perencanaan yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntable, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan Pemerintah mewujudkan Pemerintahan yang baik dengan menyelenggarakan sistem manajemen Pemerintahan yang berbasiskan kinerja sehinggga hasil atau manfaat dari pada pembangunan merupakan pengejawantahan kebutuhan masyarakat dapat memberikan daya guna dan hasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam menggunakan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan dengan pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana melalui Visi, Misi, Sasaran dan Program unggulan yang merupakan janji pemerintah terhadap masyarakat yang dibebankan kepada dinas teknis sebagai perpanjangan tangan dan diperjanjikan atas pengelolaan angggaran yang diberikan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan tuntutan masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman sangat diperlukan pelaporan tentang pengukuran kinerja berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan yang nantinya menjadi komponen pendukung pencapaian visi, misi, sasaran dan program pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih yang dicerminkan pengelolaan anggaran yang Transparan dan Akuntabel sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga mengacu pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2016– 2021.

1.2. Gambaran Umum PD (Perangkat Daerah)

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan perubahan Perda Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Sasaran dan program pemerintah kabupaten Badung yang dilaksanakan melalui proses pembangunan 5 (lima) tahunan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan serta daya saing daerah.

Pembangunan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung diarahkan untuk Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah menjadi pelaku Ekonomi yang Tangguh, Mandiri dan Profesional yang bertumpu pada Pemberdayaan Sumber Daya sebagai pilar Ekonomi Kerakyatan dengan mekanisme pasar sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi, Usaha Kecil Menengah dalam menunjang kelangsungan usahanya serta sektor perdagangan yang mampu berdaya saing untuk meningkatkan nilai ekpor baik berupa olahan maupun perdagangan sebagai menujang komponen PDRB Kabupaten Badung berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha yang menjadi sumber pendapatan Daerah.

Pada akhir tahun 2021 jumlah koperasi yang aktif sebanyak 519 dari jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Badung sebanyak 583 koperasi, sedangkan jumlah UKM tahun 2020 sebanyak 22.647 UKM dengan kualifikasi Mikro sebanyak 18.643 Kecil sebanyak 3.348 dan Menengah sebanyak 656 dengan berbagai bidang usaha yang secara administrasi yang telah berijin sebanyak 70 % (15.852 UMKM). Dari sektor Koperasi, UMKM dan perdagangan, untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana dengan indikator persentase Kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB Badung sebesar 7.71 %, (Tahun 2016), 7.73% (Tahun 2017), 7,76% (Tahun 2018), 7,80% (Tahun 2019), 7,85% (Tahun 2020) dan 7,91% (Tahun 2021) didukung 3 (tiga) tujuan dan 6 (Enam) sasaran dengan 10 (Sepuluh) indikator baik secara langsung maupun tidak lansung mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi adalah sebagai berikut.

Dari potensi yang ada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menargetkan akhir periode 5 (lima) tahun menetapkan indikator utama dan pendukung sebagai berikut :

1 Pertumbuhan UMKM Baru 2,7% (Tahun 2016), 3,80% (Tahun 2017), 3,86 (Tahun 2018), 8,16% (Tahun 2019), 10,66% (Tahun 2020) dan 13,46 % (Tahun 2021).

2 Perubahan Usaha Mikro menjadi Kecil sebesar 9,30% (Tahun 2016), 10,54% (Tahun 2017), 14,05% (Tahun 2018), 17,56 (Tahun 2019), 21,07% (Tahun 2020) dan 24,58 %, (Tahun 2021).

3 Perubahan Usaha Kecil menjadi Menengah sebesar 1% (Tahun 2016), 1,60% (Tahun 2017), 2,25% (Tahun 2018) , 2,89 %(Tahun 2019), 3,53% (Tahun 2020) dan 14,17% (Tahun 2021).

4 Koperasi Aktif sebesar 81,51% (Tahun 2016), 91,83% (Tahun 2017), 95,00% (tahun 2018) , 96,82% (tahun 2019), 97,75% (Tahun 2020) dan 97,81% (Tahun 2021).

5 Koperasi sehat sebesar 17,50% (Tahun 2016), 17,61% (Tahun 2017), 22,22% (Tahun 2018) ,27,46% (Tahun 2019), 33,12% (Tahun 2020), dan 39,41 % (Tahun 2021).

6 Penguasaan Pangsa Pasar 10% (tahun 2016), 11% (tahun 2017) 11,40% (tahun 2018) 11,60 (tahun 2019) 11,80 % (tahun 2020) dan 12% (Tahun 2021).

7 UTTP yang di Tera 10,20% (Tahun 2016), 12,49% (Tahun 2017), 24,98 (Tahun 2018), 37,47% (Tahun 2019), 49,96% (Tahun 2020) dan 62,45% (Tahun 2021).

8 Kehadiran Pegawai 64,4%.(tahun 2016), 85% (Tahun 2017) 90% (Tahun 2018),95% (tahun 2019) 100% (tahun 2020) dan 100% (Tahun 2021).

9 Predikat AKIP 78.03 (Tahun 2016), 78,05 (Tahun 2017) 79 (Tahun 2018) 80 (tahun 2019) 81 (Tahun 2020) dan 82 (tahun 2021).

10 Realisasi belanja langsung dan tidak langsung 89,97% (Tahun 2016), 90,78% (tahun 2017), 91,31% (Tahun 2018),91,50% . (tahun 2019) 91,78% (Tahun 2020), dan 91,80 (Tahun 2021)

Grafik 1.1 Target Indikator Sasaran Tahun 2016-2021

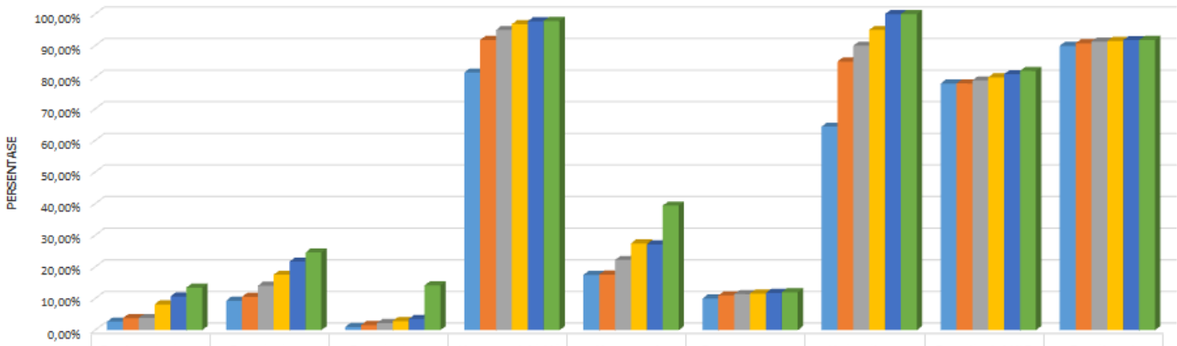

	Pertumbuhan UKM	Perubahan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Perubahan Usaha Kecil Menjadi Menengah Besar	Koperasi Aktif	Koperasi Sehat	Penguasaan Pangsa Pasar	Kehadiran Pegawai	Predikat AKIP	Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
2016	2,70%	9,30%	1,00%	81,51%	17,50%	10,00%	64,40%	78,03%	89,97%
2017	3,80%	10,54%	1,60%	91,83%	17,61%	11,00%	85,00%	78,06%	90,78%
2018	3,86%	14,05%	2,25%	95,00%	22,22%	11,40%	90,00%	79,00%	91,31%
2019	8,16%	17,56%	2,89%	96,82%	27,46%	11,60%	95,00%	80,00%	91,50%
2020	10,66%	21,70%	3,53%	97,75%	27,12%	11,80%	100,00%	81,00%	91,78%
2021	13,46%	24,58%	14,17%	97,81%	39,41%	12,00%	100,00%	82,00%	91,80%

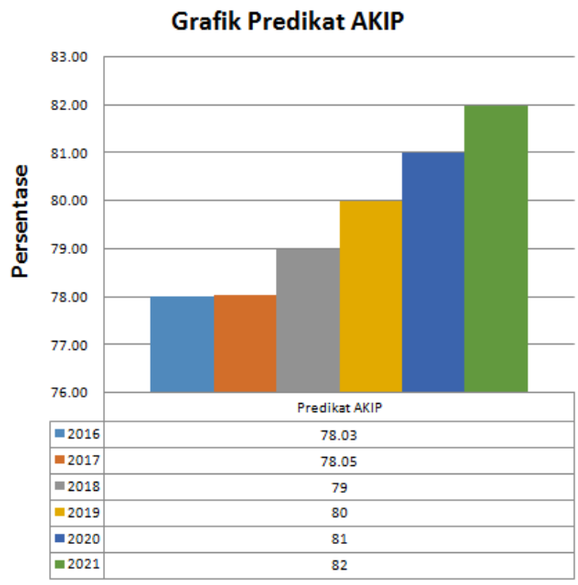

Berdasarkan atas potensi yang dimiliki serta hasil atau harapan yang diinginkan dalam 5 (lima) Tahun ke depan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dihadapkan berbagai permasalahan dan issu strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan internal berkaitan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, sarana dan prasarana pendukung sedangkan permasalahan yang bersifat eksternal adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia pengelola Koperasi, UMKM, masih rendahnya jiwa kewirausahaan dan kurangnya inovasi UMKM dalam menciptakan produk-produk unggulan yang mampu bersaing dipasaran baik lokal maupun internasional. Dalam bidang Perdagangan masih kurangnya penguasaan kemajuan teknologi, rendahnya kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga memberikan pengaruh terhadap pemenuhan konsumen dan negara tujuan ekspor.

Dalam rangka memecahkan permasalahan dan issu strategis serta mendukung pencapaian target dan peningkatan hasil yang diharapkan yang dilaksanakan dalam pembangunan pembentukan perangkat daerah adalah suatu yang sangat penting sebagai perpanjangan tangan Pemerintah daerah untuk memecahkan masalah pembangunan isu-isu yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

2. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah - langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang – undangan;
3. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan;
4. Menyusun rencana kebijakan di Bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam rangka penetapan kebijakan Bupati;
5. Menyelenggarakan promosi produk / komoditi perdagangan;
6. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas - tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing - masing;
7. Memberilan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
8. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang - undangan;
9. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
10. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;,
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Badung, susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung
2. Sekretariat terdiri atas :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Keuangan
   c. Sub. Bag.Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Bina Lembaga Koperasi terdiri dari :
   a. Seksi Penyuluhan dan Pendaftaran Badan Hukum dan Data
   b. Seksi Organisasi dan Tata Laksana
   c. Seksi Pengawasan
4. Bidang Bina Usaha Koperasi terdiri dari :
   a. Seksi Bina Usaha Usaha Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dan Perizinan Simpan Pinjam
   b. Seksi Bina Usaha Koperasi Produksi dan Konsumen.
   c. Seksi Pengendaliam Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam
5. Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
   a. Seksi Pembinaaan dan Pengembangan.
   b. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan.
   c. Seksi Data dan Pemasaran.
6. Bidang Perdagangan terdiri atas :
   a. Seksi Promosi dan Perdagangan.
   b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan
   c. Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumern.
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan Struktur Organisasi di bawah ini :

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI , UKM, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG

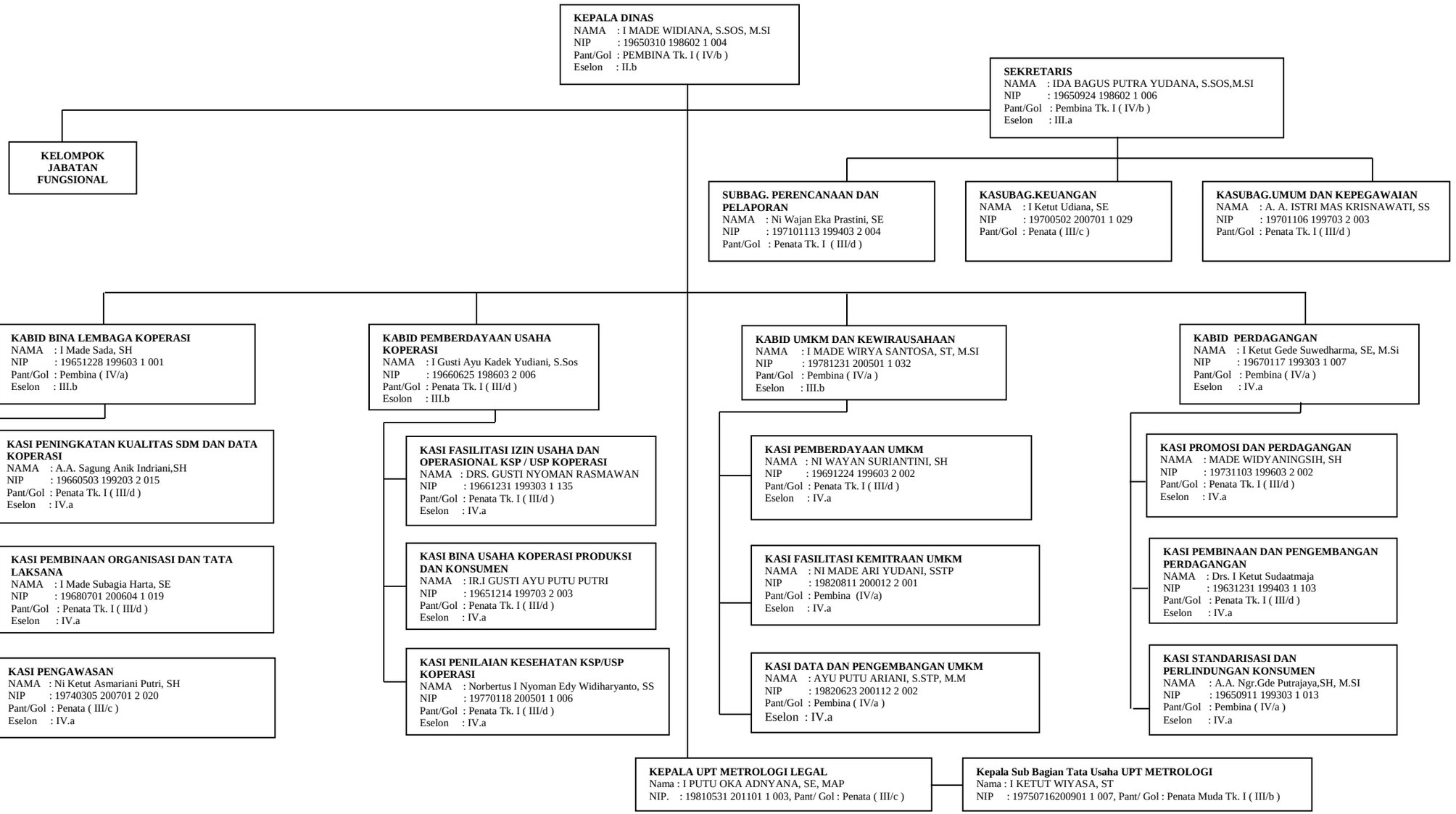

Pencapaian dan Kualitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung yang tergambar dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan kelemahan sumber daya yang bersifat internal maupun eksternal dalam bentuk peluang dan acaman yang berpengaruh terhadap pencapaian target yang telah direncanakan atau ditetapkan. Tinjauan atau analisa kajian internal merupakan interaksi langsung aparat terhadap lingkungan kerja / Instansi, sarana dan prasarana yang tersedia, kemampuan dan jumlah aparat sebagai sumber daya manusia.

Sedangkan lingkungan eskternal yang memberikan pengaruh strategis dalam mendorong serta memacu kinerja aparat, yang digambarkan dalam menentukan tujuan, sasaran dan program yang diaplikasikan dalam kegiatan meliputi antara lain, kondisi Koperasi, usaha kecil menengah dan kondisi perdagangan, lokasi kegiatan usaha dan berbagai faktor luar yang sangat menentukan yang pada hakekatnya tidak mudah untuk dikendalikan.

Dengan demikian, maka kekuatan dan kelemahan berbagai sumber daya yang ada yang berpengaruh secara internal maupun eksternal berupa peluang dan ancaman perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan terhadap Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Jumlah pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung tahun 2021 adalah sebanyak 68 Orang yang terdiri dari PNS 67 Orang, THL 1 Orang. Dari jumlah karyawan tersebut di atas yang telah menduduki jabatan sebanyak 21 Orang, terdiri dari Eselon II ; 1 Orang, Eselon III ; 5 Orang, Eselon IV ; 15 Orang.

1.4. Ruang Lingkup

Sistematika penyajian laporan kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran umum PD dengan penekanan kepada aspek strategis, serta struktur organisasi

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas / ikhtisar Perjanjian kinerja di tahun 2020 dan Indikator Kinerja tahun 2020

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasai

B. Realisasi Angaran

C. PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merupakan dokumen dalam sistem perencanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyangkut 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu pelayanan wajib bukan dasar dan pilihan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran sesuai arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan yang didukung beberapa kegiatan prioritas dan kegiatan pendukung dalam rangka menjawab atau memecahkan berbagai permasalahan pembangunan dan isu-isu yang menjadi penghambat/kendala dalam pencapaian tujuan pembangunan. Untuk mendukung capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran.

Perencanaan Kinerja merupakan tahap penting dalam melaksanakan rencana strategis (RENSTRA) yang akan menuntun manajemen dan seluruh komponen organisasi yang diukur melalui capaian kinerja yang diinginkan. Untuk mengukur sejauh mana Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung telah menetapkan sasaran strategis dan masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan atas kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang baik secara internal maupun eksternal didukung oleh ketersedian data yang valid. Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bersifat komperensif dan terintegrasi yang mengacu pada Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dengan ajaran Tri Sakti dan Nawa Cita yang dipakai sebagai landasan operasional dalam melaksanakan Pembangunan Daerah kabupaten Badung yang merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional dan dilaksanakan bersinergi dengan perangkat daerah yang lain baik menjadi penanggungjawab maupun mendukung perangkat daerah yang lain untuk mencapai sasaran dan tujuan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana 2016-2021.

Dalam rangka menetapkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tetap perpedoman atau mengacu pada Visi, Misi, Sasaran dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Badung serta tujuan yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem perencanaan pembangunan terintegrasi yang saling mendukung antar Perangkat Daerah melalui penyisiran program dan kegiatan yang memberikan dukungan terhadap keberhasilan tujuan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021. Adapum Visi, Misi dan Program unggulan Kabupaten Badung adalah sebagi berikut :

VISI

Visi adalah Rumusan umum mengenai keadaan yang dinginkan pada akhir periode perencanaan. Bertolak pada pengertian dimaksud maka Visi Pemerintah Kabupaten Badung adalah “***Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera’***

Misi

Untuk mewujudkan Visi maka Misi yang ditetapkan adalah :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermayarakat dalam jalinan keragaman Adat, Budaya dan Agama
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi
3. Memantapkan tata kelola pemerintah dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Governance
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia)
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Program Unggulan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian dalam arti luas untuk mencapai swasembada pangan melalui pengembangan kontemporer
2. Pembangunan infrastruktur wilayah diantaranya Jalan Lingkar Selatan dan Jalan Lingkar Barat (outer Ring Road and shortcut) di Kecamatan Kuta Selatan serta penataan utilitas umum melalui pembangunan jaringan utilitas terpadu
3. Meningkatkan distribusi pendapatan kepada masyarakat berpendapatan terendah melalui Program Perlindungan Sosial yang komprehensif di sektor dasar (pendidikan, kesehatan akses permodalan)
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan tenaga kesehatan dan sarana prasarana pelayanan kesehatan
5. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan sarana dan prasarana pendidikan
6. Mendorong dan memperkuat lembaga – lembaga pelatihan kerja untuk memperkuat jiwa wirausaha dan penyerapan tenaga kerja
7. Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif berbasis kerakyatan
8. Mendorong penguatan peran dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan
9. Meningkatkan kualitas dan daya saing kepariiwisataan serta difersifikasi destinasi/obyek obyek wisata

10. Memberdayakan banjar sebagai simpul/pusat pelestarian dan pengembangan budaya lokal masyarakat
11. Memperkuat eksistensi lembaga adat dan lembaga tradisional serta tatanan kehidupan masyarakat
12. Pelestarian sumber daya air dan hutan
13. Peningkatan program pengelolaan limbah dan sampah melalui upaya pengurangan penggunaan kembali dan daur ulang / 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)
14. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian
15. Penataan pewajahan wilayah serta memperbanyak ruang terbuka hijau
16. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menuju Smart City
17. Membentuk unit Reaksi Cepat terkait pelayanan publik untuk meningkatkan respon time dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, sasaran dan program unggulan dari pemerintah Kabupaten Badung Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung, mendukung Misi ke 4 (Empat) bertanggung jawab terhadap Misi 5 (Lima) dan mendukung misi 8 (Delapan) yaitu ***Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan***, ***Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar Ekonomi Kerakyatan*** dan ***Memperkuat Daya Saing Daerah Melalui Mutu Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Wilayah*** serta mendukung Tujuan ke 4 (Empat), 5 (lima) dan ke 10 (sepuluh) dari 13 (tiga belas) Tujuan RPJMD Semesta Berencana) dan Sasaran 7 (Tujuh), 10 (sepuluh) dan 16 (Enam Belas) dari 20 (dua puluh) Sasaran, pendukung indikator ke 7 (Tujuh), yaitu ***Indeks Pembangunan Manusia*** bertanggung jawab pada indikator 10 (Sepuluh) yaitu ***Persentase Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB*** dan pendukung indikator 17 (Tujuh Belas) yaitu ***Tingkat Pengangguran Terbuka*** dari 21 (Dua Puluh satu) indikator yang ada dalam RPJMD Semesta Berencana serta program ke 7 (Tujuh) dan 8 (Delapan) yaitu ***Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif Berbasuis Kerakyatan*** dan ***Mendorong Penguatan Peran Dunia Usaha.*** Untuk mendukung tercapainya hal tersebut di atas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Menetapkan Tujuan dan Sasaran dan program serta indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis didukung oleh kegiatan yang merupakan strategi untuk pemecahan permasalahan dan isu-isu yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung.

Keterkaitan Perangkat Daerah dalam Pencapaian Tujuan, Sasaran dan indikator RPJMD Semesta Berencana (2016-2021) digambarkan Cross Cutting seperti terlampir.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah Pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menetapkan tujuan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah hasil yang diharapkan dalam perencanaan pada tahun bersangkutan maupun 5 (lima) Tahun kedepan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung. Tabel 2.1

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung
(2016-2021)

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB	- Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas UMKM - Meningkatnya Koperasi aktif dan sehat
2	Terwujudnya Peningkatan Perdagangan di Kabupaten Badung	- Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan di Kabupaten Badung
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang good government	- Meningkatnya disiplin pegawai - Meningkatnya implementasi Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah - Meningkatnya tata kelola keuangan yang efektif dan efisien

Dalam upaya mewujudkan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tahun 2017 - 2021 menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sasaran,Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan

(2016-2021)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas UMKM	- Pemberdayaan dan Peningkatan Daya saing UMKM	Peningkatan kualitas SDM UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing
2	Meningkatnya Koperasi Aktif dan Sehat	- Pemberdayaan dan Peningkatan Daya saing Koperasi	Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi
3	Meningkatnya Kontribusi sektor Perdagangan di Kabupaten Badung.	- Pemberdayaan dan Penguatan sektor Perdagangan	Peningkatan UMKM yang Kreatif dan Perdaya saing
4	Meningkatnya Desiplin pegawai	- Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya tata kelola Administrasi Perkantoran
5	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya tata kelola Administrasi Perkantoran
6	Meningkatnya tata kelola Keuangan yang Efektif dan efisien	- Perberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya tata kelola Administrasi Perkantoran

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja, sedangkan yang dimaksud dengan Utama adalah unsur yang paling prioritas, dan kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan

Dengan ditetapkannya lndikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dan kegagalan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikkan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar dan terukur yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola organisasi agar mencapai hasil atau berkinerja sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Logika pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif & efisien.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, Program dan sasaran yang telah ditetapkan. lndikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Dari uraian di atas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung sebagai salah satu perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Badung menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang tabel 2.3

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	- Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	- Meningkatnya Kualitas dan kuantitas UMKM	- Persentase Pertumbuhan UKM Baru - Persentase usaha mikro menjadi kecil - Persentase usaha kecil menjadi Menengah
			- Meningkatnya koperasi aktif dan sehat	- Persentase Koperasi aktif - Persentase Koperasi sehat
2	Terwujudnya Peningkatan Perdagangan di Kabupaten Badung	- Nilai ekspor UMKM Kanupaten Badung	- Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan di Kabupaten Badung	- Persentase Penguasaan Pangsa Pasar - Persentase UTTP yang di Tera
3	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah yang good gomernment	- Persentase realisasi belanja Langsung dan Tidak Langsung	- Meningkatnya disiplin Pegawai	- Persentase kehadiran pegawai
			- Meningkatnya implementasi Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	- Predikat AKIP
			- Meningkatnya tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	- Persentase realisasi belanja langsung dan Tidak Langsung

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja Dinas ini digunakan untuk memantau capaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi, sebagaimana ditampilkan di Tabel 2.4

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan
Kabupaten Badung tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas UMKM	1. Persentase Pertumbuhan UMKM baru	%	13,46
		2. Persentase Usaha Mikro menjadi Kecil	%	24,58
		3. Persentase Usaha Kecil menjadi Menengah	%	4,17
2	Meningkatnya Koperasi aktif dan Sehat	1. Persentase Koperasi aktif	%	97.81
		2. Persentase Koperasi sehat	%	39,41
3	Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan di Kabupaten Badung	1. Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	%	12,00
		2. Persentase UTTP yang di Tera	%	62,45
4	Meningkatnya disiplin pegawai	1. Persentase kehadiran pegawai	%	100
5	Meningkatnya inplementasi Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Predikat AKIP	%	82
6	Meningkatnya tata kelola keuangan yang efektif dan Efisien	1. Persentase realisasi belanja Langsung dan Tidak Langsung	%	91,80

2.4. Cascading

Untuk mewujudkan pencapian sasaran dan target yang telah ditetapkan diperlukan adanya manajemen pengelolaan yang berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung mulai Tahun 2017 telah melaksanakan inovasi dalam hal Perjanjian Kinerja. Inovasi tersebut adalah penyusunan cascading yang memiliki makna sebuah proses dalam bentuk pohon kinerja yang berisikan tahapan- tahapan di dalam mewujudkan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Cascading ini dibuat mulai dari pimpinan sampai dengan staf sehingga memberikan kejelasan untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan dari masing-masing aparatur. (terlampir)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertaggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan tujuan, sasaran, yang didukung oleh beberapa Program dan kegiatan organisasi yang telah diukur berdasarkan indikator kinerja, yang dilaksanakan dalam satu tahun angggaran. Dalam sistem kepemerintahan / dunia birokrasi, akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan instansi yang bersangkutan dalam mengelola anggaran.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui eksistensi, kemampuan dan tujuan pembentukan suatu Organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi, dimana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja dalam periode yang akan datang, hal itu sejalan dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang titik beratnya pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja dan anggaran.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan berdasarkan Rencana Kerja Strategis 2016-2021 menetapkan kinerja melalui Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai terdiri dari 3 (tiga) tujuan, 6 (Enam) sasaran dan 10 sepuluh Indikator dengan program sebanyak 12 (Dua Belas) sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawab didukung oleh kegiatan baik yang bersifat prioritas dan pendukung pencapaian program.

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung tahun 2021 yang dilakukan dengan cara membandingkan antara kondisi pelaksanaan dengan kondisi tahun sebelumnya, dengan daerah lainnya serta kondisi akhir periode perencanaan yang ingin dicapai berdasarkan atas realisasinya, serta membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran didukung oleh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 dengan realisasinya.

Capaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yang penilaiannya dilakukan secara mandiri oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung terhadap hasil Pengukuran Kinerja indikator tujuan, indikator sasaran dan Program.

Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dan target kinerja tahun 2021.

Hasil pengukuran indikator capaian tujuan atas indikator tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2021 berdasarkan Tujuan dan Indikator Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2020	Kondisi Akhir yang ingin dicapai (2021)	Realisasi Tahun 2021	Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	- Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	13,04%	7,91%	14,25 %	180,15%
2	Terwujudnya Peningkatan Perdagangan di Kabupaten Badung	- Nilai Ekspor UMKM Kabupaten Badung	US$ 62.376.970,68	US$ 57.260.445.10	USS. 46.849.699,86	81,82%
3	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang good goverment	- Persentase realisasi belanja langsung dan tidak langsung	90,30%	91,80%	90,89%	99,01%

Grafik 3.1.
Persentase Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB

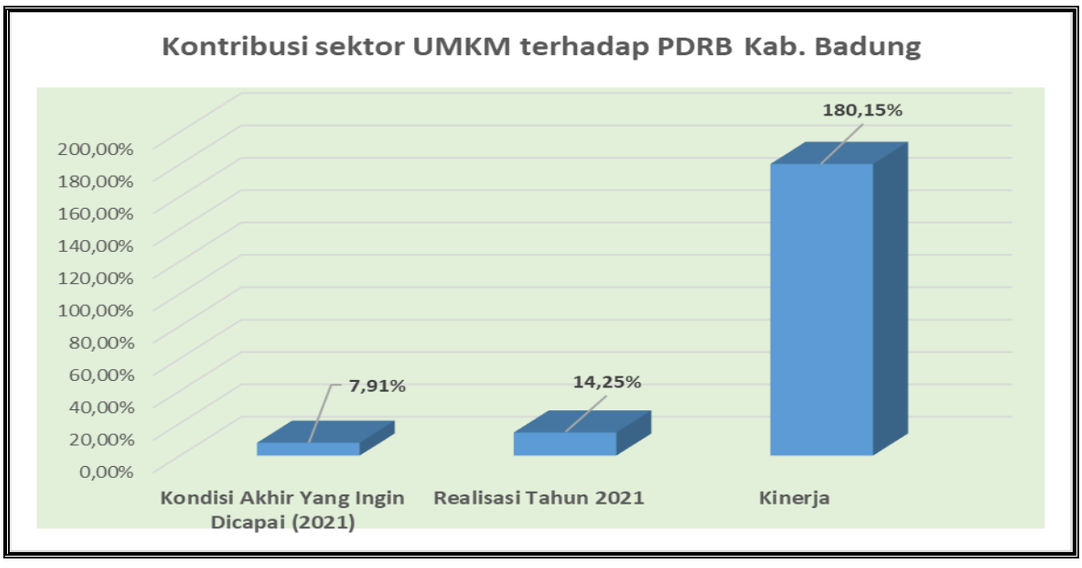

Kalau dilihat dalam kurun waktu 5 tahun (2017-2021), perbandingan target, realisasi dan kinerja dinas ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Target, Realisasi dan Kinerja untuk Indikator Tujuan Kontribusi Sektor UMKM terhadap UMKM Kabupaten Badung

Item	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Target	7,73%	7,76%	7,80%	7,85%	7,91%
Realisasi	7,73%	10,62%	10,68%	13,04%	14,25%
Kinerja	100,00%	136,86%	136,92%	166,11%	180,15%

Grafik 3.2
Grafik Perbandingan Target, Realisasi dan Kinerja untuk Indikator Tujuan Kontribusi Sektor UMKM terhadap UMKM Kabupaten Badung

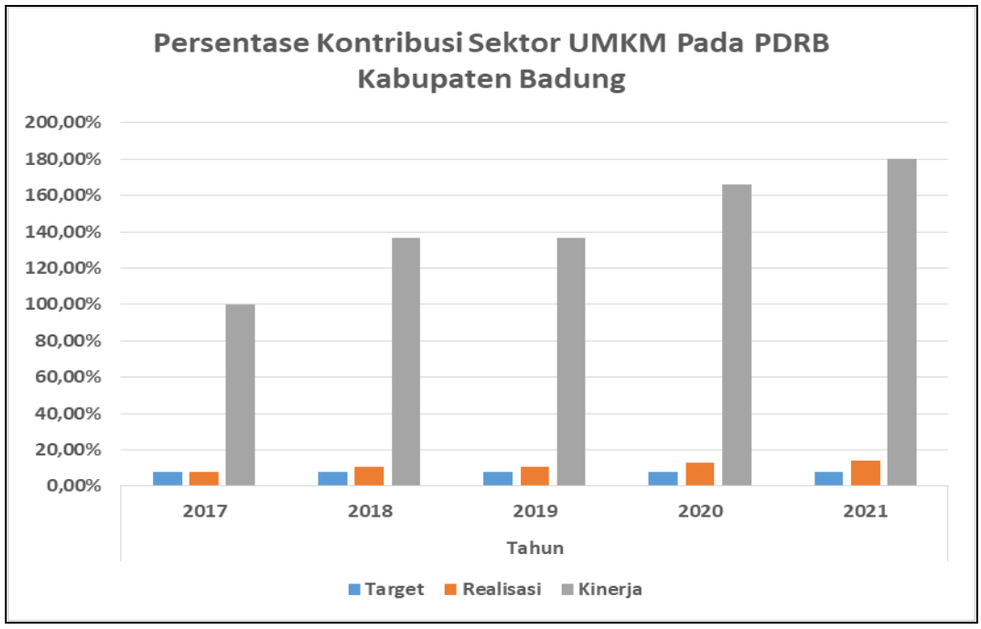

Dalam kurun waktu 2017-2021, terlihat bahwa kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB Kabupaten Badung selalu mencapai, bahkan melebihi target.

Untuk indikator tujuan kedua yaitu nilai ekspor Kabupaten Badung, untuk tahun 2021, perbandingan antara target ekspor tahun 2021 dibandingkan realisasi dan kinerja dinas ditampilkan pada grafik 3.3.

Grafik 3.3

Nilai ekspor Kabupaten Badung Tahun 2021 (Dalam US$)

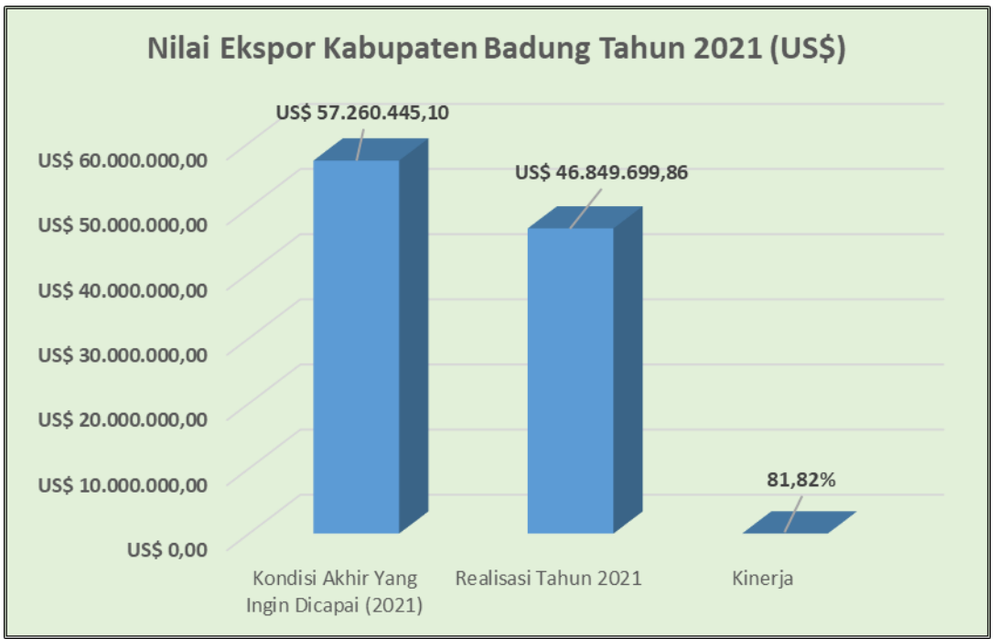

Dari grafik di atas, terlihat bahwa nilai ekspor Kabupaten Badung tahun 2021 tidak mencapai target. Untuk kurun waktu 2018 sampai 2019, perbandingan target, realisasi dan kinerja dinas ditampilkan pada tabel 3.3

Tabel 3.3.
Target, Realisasi dan Kinerja Dinas untuk Indikator Tujuan Nilai Ekspor Kabupaten Badung (dalam US$)

Item	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Target	54.135.300,50	55.785.400,25	56.425.600,15	57.260.445,10
Realisasi	125.643.300,69	91.421.980,59	62.376.970,68	46.849.699,86
Kinerja	232,09%	163,88%	110,55%	81,82%

Grafik 3.4.
Grafik Perbandingan Target, Realisasi dan Kinerja untuk Indikator Tujuan Nilai Ekspor Kabupaten Badung (Dalam US$)

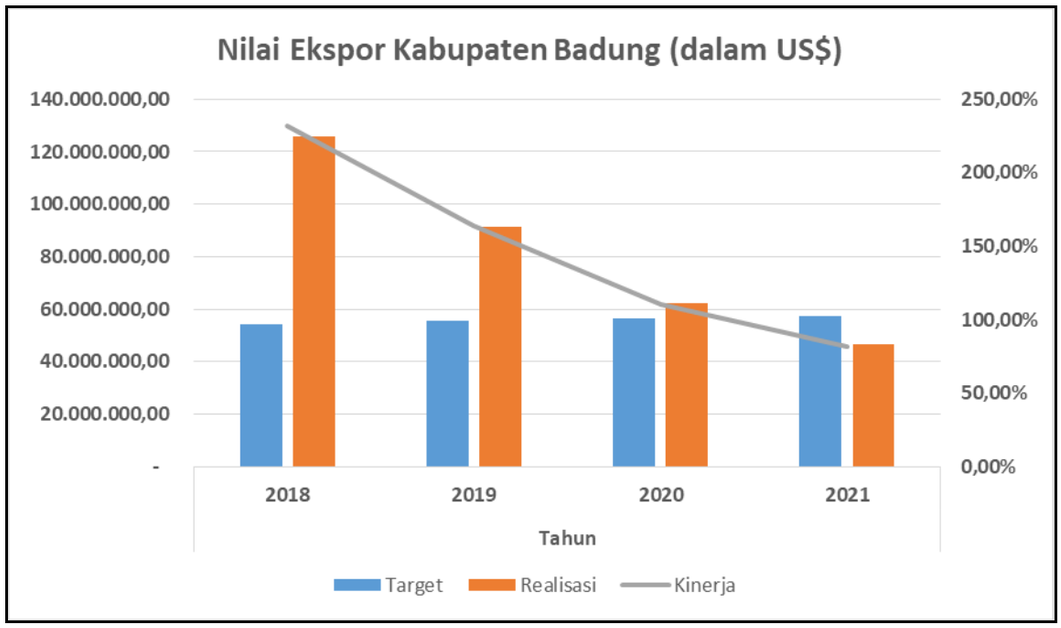

Terlihat bahwa dalam kurun waktu 2018-2021 terjadi penurunan nilai ekspor Kabupaten Badung. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid -19 yang menyebabkan kelesuan ekonomi di seluruh dunia.

Sementara untuk indikator tujuan ketiga yaitu realisasi belanja langsung dan tidak langsung, perbandingan target akhir yang ingin dicapai (tahun 2021) dibandingkan realisasi dan kinerja dinas ditampilkan pada grafik 3.5

Grafik 3.5
Persentase Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung

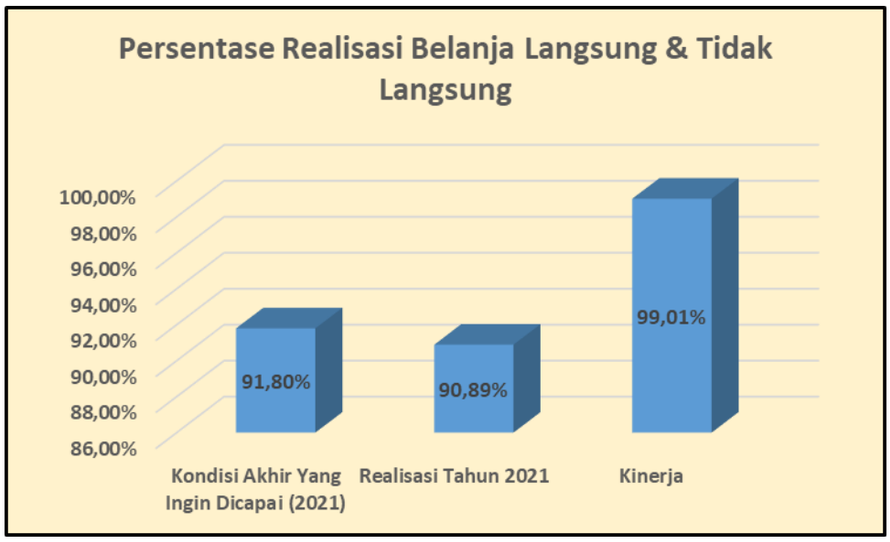

Untuk tahun 2021, persentase realisasi belanja langsung dan tidak langsung tidak mencapai target yaitu hanya sebesar 90,89 % (di bawah target sebesar 91,80%) dengan kinerja sebesar 99,01 %

Tabel 3.4.
Target, Realisasi dan Kinerja Dinas untuk Indikator Tujuan Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Item	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Target	90,78%	91,31%	91,50%	91,78%	91,80%
Realisasi	84,77%	84,77%	93,48%	90,30%	90,89%
Kinerja	93,38%	92,84%	102,16%	98,39%	99,01%

Grafik 3.6
Grafik Perbandingan Target, Realisasi dan Kinerja untuk Indikator Tujuan Persentase Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung

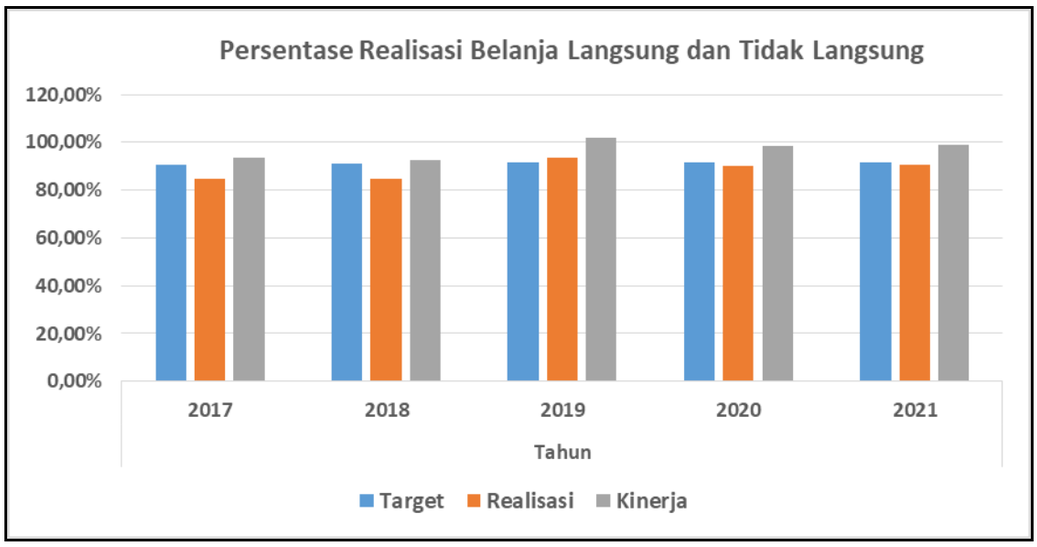

Dalam kurun waktu 2017-2021, realisasi cenderung mencapai target dengan kinerja dinas pada periode akhir (tahun 2021) mendekati 100 %. Hasil ini tergolong bagus

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2021
Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi 2020	Kondisi Akhir yg ingin dicapai	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas UMKM	1. Persentase Pertumbuhan UMKM baru 2. Persentase Usaha mikro menjadi kecil 3. Persentase usaha kecil menjadi menengah	16,6% 19,99% 0,61%	13,46% 24,58 % 4,17 %	13,46% 24,58% 4,17%	80,99% - -	601,72 % - -
2	Meningkatnya Koperasi aktif dan sehat	1. Persentase Koperasi Aktif 2. Persentase Koperasi Sehat	89,02.% 30,84 %	97,81 % 39,41 %	97,81% 39,41%	88,65 % 38,32 %	90,63 % 97,23 %
3	Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan di Kabupaten Badung	1. Persentase Penguasaan Pangsa Pasar 2. Persentase UTTP yang di Tera	18,73 % 54,53 %	12 % 62.45 %	12 % 62,45 %	17,86 % 71,8 %	148,83 % 114,97 %
4	Meningkatnya disiplin pegawai	1. Persentase kahadiran pegawai	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
5	Meningkatnya implementasi Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	1. Predikat AKIP	81,86	82	82	76,84	93,73 %
6	Meningkatnya tata kelola keuangan yang efektif dan Efisiensi	1. Persentase realisasi belanja langsung dan tidak langsung	88,70%	91,80 %	91,80%	91,4%	99,56%

Realisasi indikator sasaran dibandingkan dengan target sasaran yang telah ditetapkan tidak terlepas dari program-program yang mendukungnya. Program merupakan suatu langkah – langkah yang sangat penting dan strategis untuk mendukung pencapian sasaran yang didalamnya terdapat berbagai kegiatan – kegiatan baik yang bersifat utama maupun pendukung yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian program yang merupakan Prestasi dari seluruh kegiatan yang ada dalam program

Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tahun 2021 ini merupakan pelaporan kinerja sampai akhir tahun 2021 yang menyajikan Indikator Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran yang didukung oleh program untuk menjadikan kodisi/hasil yang ingin dicapai dalam tahun 2021 serta memberi informasi atas keberhasilan maupun kegagalan dari pencapaian sebuah tujuan, sasaran dan program berdasarkan indikator yang dipergunakan untuk mengukurnya. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan analisis sebagai pendukung terhadap hasil pengukuran pencapaian tujuan yang dijabarkan dalam keberhasilan dari sasaran berdasarkan indikator kinerja baik utama maupun pendukung.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung bersama jajarannya telah berupaya untuk mencapai target berupa 3 (tiga) tujuan, 6 (enam) sasaran dan 7 (Tujuh) indikator kinerja utama dan 3 (Tiga) indikator penunjang sasaran yang semuanya memberikan dukungan baik langsung maupun tidak tangsung terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran.

Adapun analisa terhadap capaian kinerja tujuan yang penjabarannya melalui alat ukur tujuan dan didukung indikator kinerja sasaran dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai wadah kegiatan di masyarakat baik sebagai produsen, konsumen maupun lembaga diharapkan mampu berperan dan menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah usaha memberikan andil besar dalam meningkatkan perekonomian rakyat dan sekaligus turut memperbaiki kondisi usaha rakyat, sementara UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan serta dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Badung yang menjadi sumber pembiayaan dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi, Sasaran dan program pemerintah sebagai pendukung keberhasilan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan ini memilki 1 (satu) indikator yaitu : ***Persentase Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB***. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh 2 (Dua) Sararan yaitu Peningkatan Kuantitas dan Kualitas UMKM dan Meningkatnya Koperasi Aktif dan Sehat dengan indikator sasaran sebanyak 5 (Lima). Pengukuran terhadap pencapaian

tujuan di atas diukur melalui Prosentase Pertumbuhan UKM baru, Persentase Usaha Mikro menjadi Kecil, Persentase Usaha Kecil menjadi Menengah, Persentase Koperasi Aktif dan Persentase Koperasi yang Sehat. Hasil capaian indikator pendukung tujuan adalah sebagai berikut (tabel 3.6)

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Tujuan : Terwujudnya Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB

No.	Indikator sasaran	Kondisi 2020	Kondisi Akhir yang diharapkan (Target)	Capaian Kinerja 2021	Persentase Kinerja (%)
1	3	4	5	6	7
1	Persentase Pertumbuhan UMKM baru	16,6%	13,46%	80,99%	601,72%
2	Persentase Usaha Mikro menjadi Kecil	19,99%	24,58%	-	-
3	Persentase Usaha Kecil menjadi menengah	0,61%	4,17%	-	-
4	Persentase Koperasi yang aktif	89,02%	97,81%	88,65%	90,63%
5	Persentase Koperasi yang sehat	30,84%	39,41%	38,32%	97,23%

Capaian Indikator Tujuan yaitu Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB dari kondisi tahun 2020 sebesar 13,04 % dan tahun 2021 ditargetkan sebesar 7,91% terealisasi sebesar 14,25 % (hasil sementara menungggu kajian BPS Maret s/d April 2022). Capaian kinerja untuk tujuan 1 (satu) yaitu : Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB, yang didukung oleh 2 (Dua) sasaran dan 5 (lima) indikator. Capaian kinerja Tujuan sebesar 180,15 % ini berarti tujuan tersebut tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh dukungan pencapaian masing masing masing indikator sasaran yang didukung oleh program dan pelaksanan kegiatan berjalan sesuai dengan harapan sehingga pencapaian indikator tujuan dapat tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Ini juga karena adanya penurunan sektor sektor yang terkait dengan pariwisata disebabkan lesunya pariwisata selama pandemi covid-19. Keberhasilan pencapaian indikator tujuan didukung oleh indikator sasaran antara lain:

1. Indikator Persentase Pertumbuhan UMKM Baru

Indikator ini didukung 2 (Dua) Program yaitu Program Pengembangan UMKM dan program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan kegiatan sebanyak 2 (dua), sub kegiatan sebanyak 2 (dua), terealisasi sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.454.037.953,- realisasi sebesar Rp. 338.349.892. Capaian kinerja keuangan sebesar 74,52% terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 115.688.061,- (25,48%) . Kalau dibandingkan dengan capaian kinerja keuangan tahun 2020 sebesar 95,59 %, terjadi penurunan sebesar 25,07%. Kondisi tahun 2021 jumlah UMKM di Kabupaten Badung adalah 40.989 UMKM, jauh bertambah dibandingkan awal periode Renstra (2016) sebanyak 15.826 UMKM dan meningkat dari jumlah UMKM tahun 2020 sebanyak 22.647 UMKM. Capaian kinerja indikator untuk tahun 2021 adalah sebesar 80,99 % dengan capaian kinerja sebesar 601,72 %. Kalau dibandingkan dengan target di akhir periode Renstra yaitu tahun 2021 yang sebesar 13,46 %, target sudah jauh terlampaui. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah UMKM yang signifikan dari tahun 2016-2021. Peningkatan pertumbuhan UMKM pada tahun 2021 karena adanya pandemi covid 19 yang membuat banyak pekerja pariwisata terkena pemutusan hubungan kerja dan masuk ke sektor usaha UMKM dan adanya minat dan kemampuan masyarakat melihat dan memanfaatkan peluang pasar yang ada akibat lesunya sektor pariwisata yang mendorong pertumbuhan perekonomian di sektor non pariwisata.

Dalam rentang 2016-2021, terjadi peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Badung yang ditampilkan pada tabel 3.7

Tabel 3.7
Target, Realisasi dan Kinerja Dinas untuk Indikator Tujuan
Persentase Pertumbuhan UMKM Baru

Item	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Target	3,80 %	3,86 %	8,16 %	10,66 %	13,46 %
Realisasi	7,70 %	6,53%	6,19%	17,46%	80,99%
Kinerja	202,63%	169,18%	75,86%	163,77%	601,72%

Grafik 3.7
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi untuk Indikator Tujuan Persentase Pertumbuhan UMKM Baru

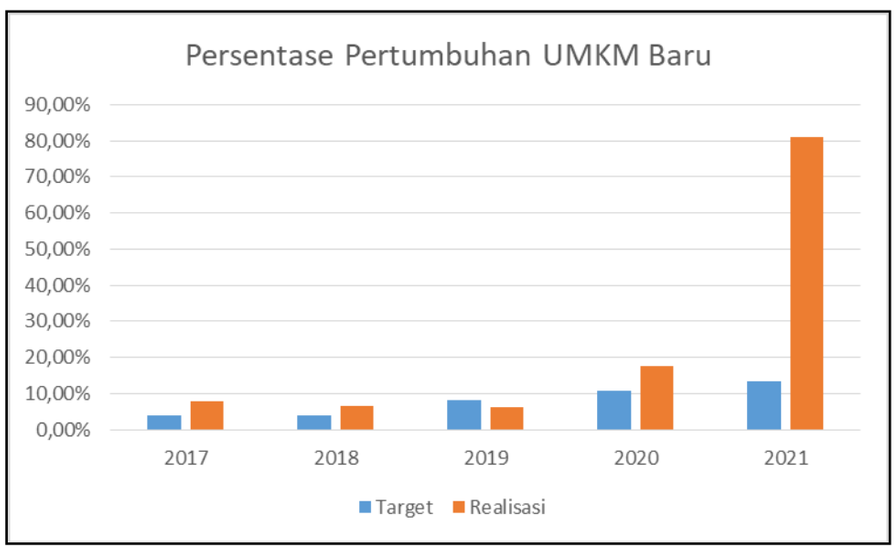

2. Indikator Persentase Usaha Mikro menjadi Kecil

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, yang memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000 (Dua Milyar Rupiah). Pencapaian Indikator sasaran ini, tidak didukung oleh program manapun sehingga tidak ada capaian keuangan. Persentase pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Kecil di kabupaten Badung Tahun 2021 tidak dihitung karena tidak ada program, kegiatan maupun sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini. Di samping itu, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dimana terjadi perubahan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan, banyak usaha mikro tidak bisa naik menjadi usaha kecil.

3. Indikator Persentase Usaha Kecil menjadi Menengah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, yang memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah). Pencapaian Indikator sasaran ini, tidak didukung oleh program manapun sehingga tidak ada capaian keuangan. Persentase pertumbuhan Usaha Kecil menjadi Menengah di kabupaten Badung Tahun 2021 tidak dihitung karena tidak ada program, kegiatan maupun sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini. Di samping itu, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dimana terjadi perubahan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan, banyak usaha kecil tidak bisa naik menjadi usaha menengah.

4. **Indikator Persentase Koperasi aktif.**

Koperasi adalah merupakan lembaga keuangan yang dalam pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jumlah koperasi di Kabupaten Badung tahun 2021 adalah sebanyak 599. Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan operasional untuk melayani kebutuhan anggota sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi sebanyak 531 dan tidak aktif sebanyak 68 koperasi. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini didukung oleh 1 (Satu) Program yaitu Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua), sub kegiatan sebanyak 2 (dua), terealisasi sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Jumlah anggaran sebesar Rp.462.748.640 realisasi sebesar Rp. 417.719.938,-. Capaian kinerja keuangan sebesar 90,27% terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 45.028.702 (9,73%). Jumlah persentase

koperasi aktif tahun 2021 sebesar 88,65%, target tahun 2021 adalah sebesar 97,81%, realisasi sebanyak 90,63%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 92,23% mengalami penurunan sebesar 3,58 %. Realisasi capaian kinerja di bawah target yang telah ditetapkan dipengaruhi berbagai faktor diantaranya adalah tidak adanya perubahan koperasi yang tidak aktif menjadi aktif serta adanya pandemi covid -19 yang mengganggu bisnis koperasi sehingga sejumlah koperasi bisnisnya menjadi tidak aktif, tidak melakukan RAT, pada akhirnya statusnya menjadi tidak aktif

Tabel 3.8
Target, Realisasi dan Kinerja Dinas untuk Indikator Tujuan
Persentase Koperasi Aktif

Item	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Target	91,83%	95,00%	96,82%	97,75%	97,81%
Realisasi	92,00%	92,34%	92,23%	89,02%	88,65%
Kinerja	100,19%	97,20%	95,26%	91,07%	90,63%

Grafik 3.8
Grafik Perbandingan Target, Realisasi dan Kinerja untuk Indikator Tujuan
Persentase Koperasi Aktif

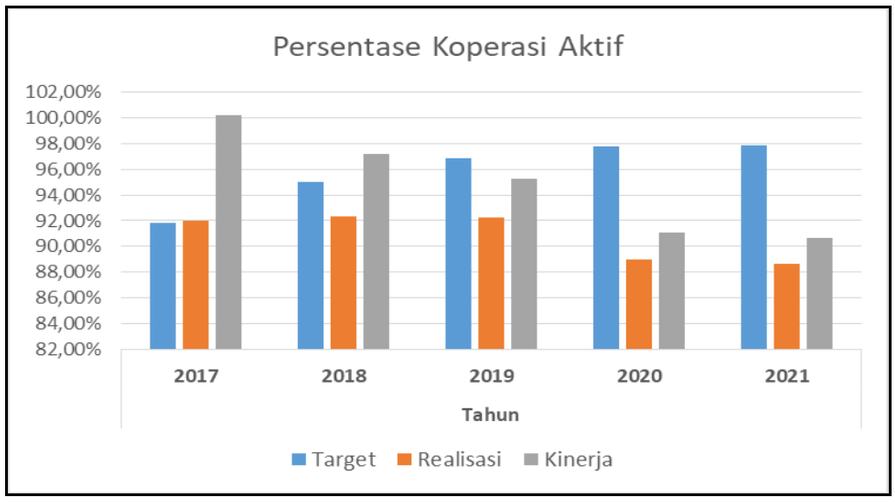

Dalam rentang 2017-2021, terlihat ada kecenderungan persentase koperasi aktif mengalami penurunan. Realisasi cenderung dibawah target dengan sebab sebab sebagaimana diuraikan di atas

5. Indikator Persentase Koperasi yang sehat

Koperasi sehat adalah koperasi yang secara pengelolaannya telah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penilaian kesehatan koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Untuk mendukung capaian kinerja sasaran ini didukung program sebanyak 1 (Satu) Program yaitu Program Penilaian Kesehatan KSP/USP, dengan kegiatan sebanyak 1 (satu), sub kegiatan sebanyak 1(satu), realisasi sebanyak 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan. jumlah anggaran sebesar Rp. 130.059.000,- realisasi sebesar Rp. 111.529.075,- capaian kinerja keuangan 85,75% efisiensi sebesar Rp. 18.529.925,- (14,25%). Target Koperasi sehat tahun

2021 sebesar 39,41% realisasi sebesar 38,32% persentase kinerja sebesar 97,23% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 30,84 % mengalami kenaikan sebesar 7,48%. Terjadinya peningkatan ini diakibatkan oleh adanya situasi dan kesadaran anggota terkait dengan perkoperasian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor : 20/Per/M/KUKM/XI/2008, tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, bahwa tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi adalah memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi dan masyarakat agar koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan prinsip koperasi secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Jumlah koperasi sehat di Kabupaten Badung tahun 2021 (tabel 3.5)

Tabel 3.9
Jumlah koperasi sehat Tahun 2021 Di Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Kategori Hasil Penilaian		
		Sehat	Cukup Sehat	Dalam Pengawasan
1	Petang	0	5	1
2	Abiansemal	10	33	3
3	Mengwi	13	40	4
4	Kuta Utara	7	34	2
5	Kuta	3	4	3
6	Kuta Selatan	8	17	1
	Jumlah	**41**	**133**	**14**

Sumber data Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi (2021)

Kabupaten Badung tahun 2021 menargetkan koperasi sehat sebesar 39,41% dengan pelaksanaan penilaian sebanyak 188 koperasi dengan hasil penilaian : kategori sehat sebanyak 41 koperasi (21,8%), kategori cukup sehat, sebanyak 133 koperasi (70,8%) dan kategori dalam pengawasan sebanyak 14 koperasi (7,4%) Peningkatan nilai kesehatan koperasi disebabkan situasi ekonomi yang mendukung, perbandingan modal sendiri, pemberian kredit kepada pihak ketiga/luar anggota lebih besar, pinjaman modal luar lebih kecil dari modal sendiri serta meningkatnya pemahaman anggota koperasi terkait dengan perkoperasian menyangkut hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab angggota. Untuk itu kedepannya akan terus diupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan pengelolaan koperasi agar terus menjadi koperasi yang sehat dengan melaksanakan pelatihan pendampingan, meningkatkan modal penyertaan dari anggota, meningkatkan pinjaman kepada anggota, meningkatkan manajemen pengelolaan koperasi, dan akan terus ditingkatkan pelaksanaan penilaian terhadap kesehatan koperasi baik dari sisi SDM maupun anggaran, serta mengoptimalkan program dan kegiatan pendukungnya.

Pergerakan persentase koperasi sehat di Kabupaten Badung dalam rentang 2017 – 2021 ditampilkan pada Tabel 3.10

Tabel 3.10
Target, Realisasi dan Kinerja Dinas untuk Indikator Tujuan
Persentase Koperasi Sehat

Item	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Target	17,61%	22,22%	27,46%	33,12%	39,41%
Realisasi	19,53%	17,90%	34,58%	30,84%	38,32%
Kinerja	110,90%	80,56%	125,93%	93,12%	97,23%

Grafik 3.9
Grafik Perbandingan Target, Realisasi dan Kinerja untuk Indikator Tujuan
Persentase Koperasi Sehat

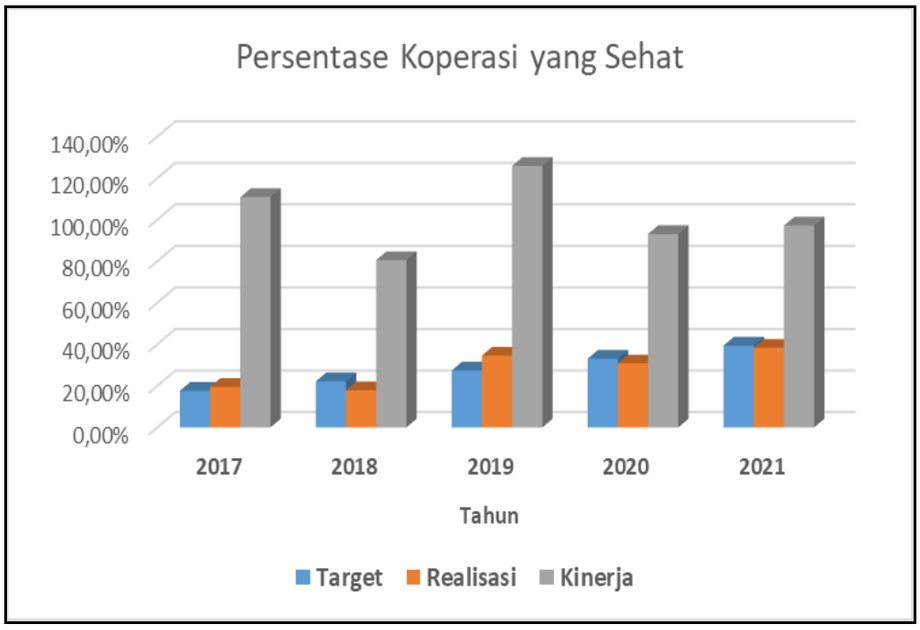

Dalam rentang 2017-2021, realisasi persentase koperasi sehat cenderung mencapai target bahkan pernah melebihi target. Untuk indikator tujuan persentase koperasi sehat, pihak Dinas sudah mencapai kinerja yang baik.

Tercapainya Indikator Tujuan ini diakibatkan beberapa hal antara lain :

1. Jumlah UMKM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk membangun usaha masih relatif tinggi sesuai dengan potensi yang ada, didukung oleh adanya peluang atau kemudahan permodalan dalam menunjang usahanya dari lembaga keuangan yang menyediakan kredit usaha bagi para UMKM.
2. Adanya perubahan klasifikasi UMKM yang menunjukkan bahwa kemampuan UMKM dalam menciptakan produk yang berdaya saing serta meningkatnya jiwa kewirausahaan UMKM melihat peluang pasar.
3. Meningkatnya pengetahuan UMKM khususnya berkaitan dengan penguasaan teknologi sehingga dapat mengakses peluang dalam pemasaran produk.
4. Meningkatnya sistem pengelolaan usaha koperasi menjadi lebih baik dari SDM maupun manajemen tata kelola sehingga menjadi lembaga yang mandiri.

Tujuan 2 : Terwujudnya Peningkatan Perdagangan di Kabupaten Badung

Perdagangan merupakan sektor jasa yang mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menunjang pertumbuhan perekonomian serta berkontribusi terhadap PDRB berdasarkan lapangan usaha yang nantinya menyumbangkan komponen atau struktur PAD Kabupaten Badung yang dipergunakan sebagai sumber pembiayaan dalam rangka melaksanakan pembangunan sebagai tuntutan masyarakat

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Indikator Tujuan 2

No.	Indikator Sasaran	Kondisi 2020	Kondisi Akhir yang diharapkan (Target 2021)	Realisasi Tahun 2021	Persentase Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	18,73%	12%	17,86%	148,83%
2.	Persentase UTTP yang di Tera	54,53%	62,45%	71,8%	114,97 %

Grafik 3.10
Persentase Penguasaan Pangsa Pasar

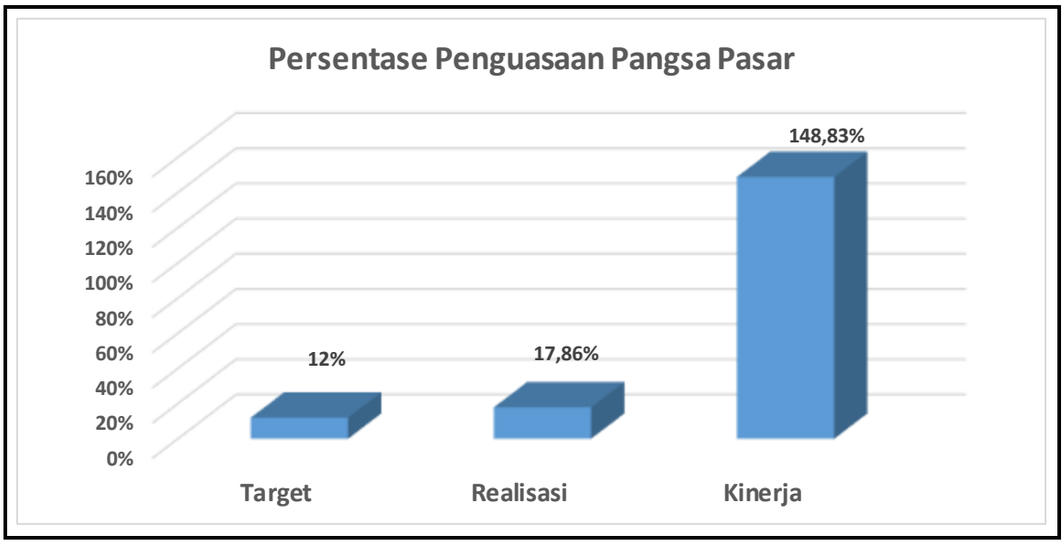

Pengukuran terhadap Tujuan 2 yaitu meningkatnya nilai ekspor UMKM Kabupaten Badung 2021. Kondisi 2020 sebesar US$ 62.376.970,68 Target tahun 2021 sebesar US$. 57.260.445,10 realisasi sebesar US$. 46.849.699,86, capaian kinerja sebesar 81,82%. Bila dibandingkan dengan realisasi nilai ekspor Kabupaten badung tahun 2020 sebesar US$ 62.376.970,68, untuk tahun 2021 ada penurunan nilai ekspor sebesar US$ 15.527.270,82 atau sebesar 24,89 %. Adanya penurunan ini disebabkan karena lesunya perekonomian disebabkan karena pandemi covid-19.

Pencapaian tujuan ini didukung oleh 1 (satu) Sasaran dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Persentase Penguasaan Pangsa Pasar

Persentase Penguasaan Pangsa Pasar dengan program sebanyak 1 (satu) program yaitu : 1.Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya didukung kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, realisasi sebanyak 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 36.808.823,- realisasi sebesar Rp. 3.324.400,- Capaian kinerja keuangan sebesar 9,03% efisiensi sebesar Rp. 33.484.423,- (90,97%).

Target penguasaan pangsa pasar pada tahun 2021 sebesar 12%, realisasi sebesar 17,86%, capaian kinerja sebesar 148,83%. Bila dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 18,73%, mengalami penurunan sebesar 0,87%. Meskipun ada penurunan penguasaan pangsa pasar, namun produk produk Kabupaten Badung masih mampu bersaing di pasar. Tercapainya target tahun 2021 didukung oleh adanya revitalisasi pasar rakyat sebagai sarana jual beli barang serta kemajuan teknologi yang mendorong produsen untuk melakukan pemasaran secara online dan di sisi konsumen melakukan pembelian secara online. Persentase penguasaan pangsa pasar dalam kurun waktu 2017-2021 ditampilkan pada Tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.12
Target, Realisasi dan Kinerja Dinas untuk Indikator Tujuan
Persentase Penguasaan Pangsa Pasar

Item	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Target	11%	11,40%	11,60%	11,80%	12%
Realisasi	20,77%	16,74%	19,84%	18,73%	17,86%
Kinerja	188,82%	146,84%	171,03%	158,73%	148,83%

Grafik 3.10
Grafik Perbandingan Target, Realisasi dan Kinerja untuk Indikator Tujuan
Persentase Penguasaan Pangsa Pasar

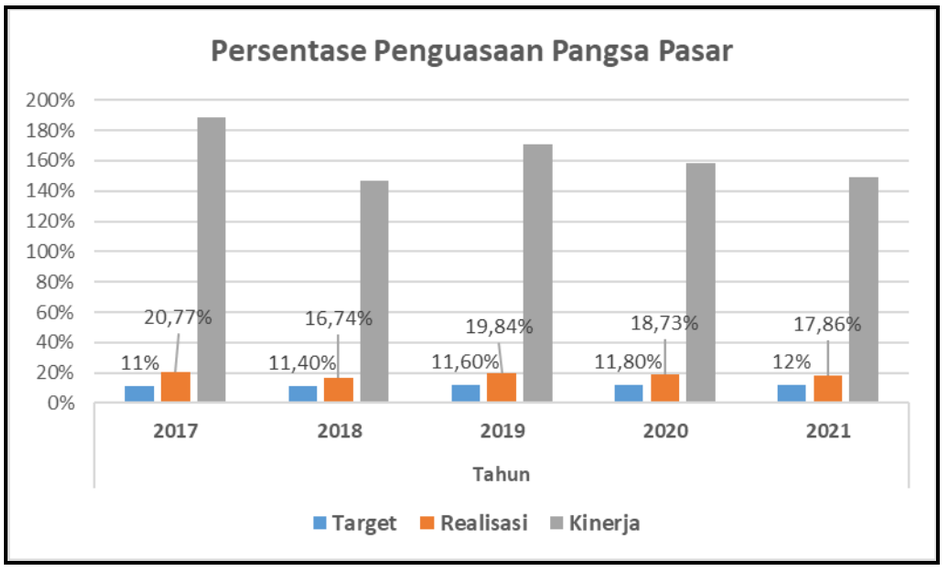

Dari grafik di atas, terlihat bahwa untuk periode 2017-2021, realisasi persentase penguasaan pangsa pasar selalu di atas target, menunjukkan kinerja yang baik

2. Persentase UTTP yang di Tera

Indikator ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan sebanyak 1 (satu) dengan 1 (satu) sub kegiatan, terealisasi sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 371.499.152,- realisasi sebesar Rp. 343.418.408,- Capaian kinerja keuangan sebesar 92,44%. Terjadi efesiensi sebesar Rp 28.080.744,- (7,56%). UTTP merupakan alat yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk memberikan keamanan dan kenyamanan berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap ketepatan jumlah, volume, ukuran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Target Tahun 2020 sebesar 49,96%, realisasi sebesar 54,53% capaian kinerja sebesar 109,15%. Target 2021 sebesar 62,45% realisasi sebesar 71,8% capaian kinerja sebesar 114,97%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar 17,27 % disebabkan karena pelaksanaan tera/tera ulang bisa meng-cover lebih banyak UTTP di Kabupaten Badung

Tabel 3.13
Target, Realisasi dan Kinerja Dinas untuk Indikator Tujuan
Persentase UTTP yang ditera

Item	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Target	12,49%	24,98%	37,47%	49,96%	62,45%
Realisasi	7,66%	24,98%	30,82%	54,53%	71,80%
Kinerja	61,33%	100,00%	82,25%	109,15%	114,97%

Grafik 3.11
Grafik Perbandingan Target, Realisasi dan Kinerja untuk Indikator Tujuan
Persentase UTTP yang Ditera

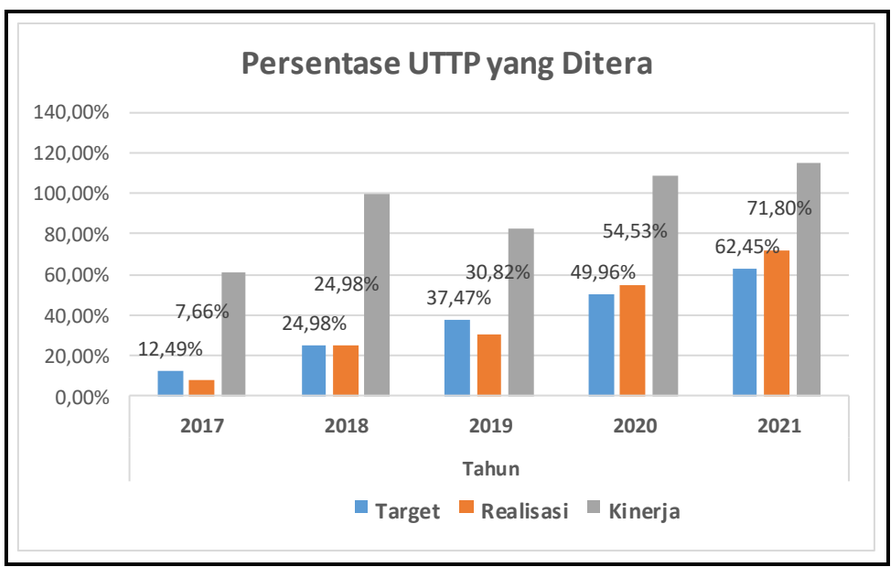

Dari grafik di atas terlihat bahwa ada kecenderungan realisasi persentase UTTP yang ditera di Kabupaten Badung meningkat dari tahun ke tahun.

Capaian kinerja terhadap 2 (dua) indikator ini sebesar 148,83% dan 114,97% melebihi target diakibatkan beberapa hal antara lain:

1. Pelaku usaha mendapat konsumen baru karena pelaku usaha telah mulai mempromosikan dan menjual produknya secara langsung secara online
2. Daya saing produk dan pelaku usaha di Kabupaten Badung dalam hal peningkatan kualitas dan desain produk sudah dapat ditingkatkan
3. Pelaku usaha di Kabupaten Badung bisa memenuhi persyaratan ekspor produk berbahan dasar hasil hutan mulai tahun 2012 (sertifikat legalitas kayu)
4. Pelaku usaha di kabupaten Badung mampu menelurkan produk produk baru dengan kualitas dan harga bersaing, sehingga mampu menarik minat konsumen.

Tujuan 3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang good government.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang diatur peraturan perundangan yang berlaku diperlukan adanya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan yang berintegritas, berkarakter serta mampu melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh organisasi. Untuk mewujudkan tujuan ini didukung oleh 3 (tiga) sasaran antara lain :

1. Meningkatnya disiplin pegawai.
2. Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah.
3. Meningkatnya tata kelola keuangan yang efektif dan efisien.

Ke 3 (tiga) sasaran didukung 3 (tiga) indikator yang merupakan alat ukur keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam mengemban tugas yang diamanatkan. Tercapainya target tujuan diatas didukung oleh sasaran dengan indikator sasaran seperti tabel berikut.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Indikator Tujuan 3
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang good government

No.	Indikator sasaran	Kondisi Tahun 2020	Kondisi Akhir yang diharapkan (Target)	Capaian Kinerja	Persentase Kinerja (%)
1	3	4	5	6	7
1	Persentase kehadiran pegawai	100%	100%	100%	100%
2.	Predikat AKIP	81,86	82	76,24	92,98%
3	Persentase Realisasi belanja langsung dan tidak langsung	88,70%	91,80%	91,40%	99,56%

Sasaran 1 : Meningkatnya disiplin Pegawai

Keberadaan dan disiplin pegawai dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting dan strategis dalam menggerakkan roda organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mendukung pencapaian tujuan

organisasi diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten, beretos kerja yang tinggi didukung oleh kedisiplinan terutama terkait dengan waktu dan kehadiran. Untuk mengukur tingkat disiplin pegawai adalah dengan indikator persentase kehadiran pegawai. Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%. Pencapaian target ini didukung oleh 1 (satu) Program yaitu 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan kegiatan sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan 12 (dua belas) sub kegiatan, realisasi sebanyak 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 10.772.745.242 realisasi sebesar Rp.9.913.663.537,- capaian kinerja keuangan 92,025 % terjadi efisiensi sebesar Rp. 859.081.705 (7,975%). Capaian kinerja sasaran pada tahun 2020, realisasinya sebesar 100%. Target tahun 2021 sebesar 100% realisasi sebesar 100. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 tidak ada peningkatan karena sudah maksimal. Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah dalam renstra sebesar 100% telah tercapai sebesar 100%. Tercapainya target indikator ini diakibatkan disiplinnya pegawai menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pembinaan maupun pengawasan melekat yang dilaksanakan berjenjang yang didasari atas perjanjian kinerja yang telah disepakati yang dapat dipergunakan dalam memberikan sanksi dan penghargaan terhadap pegawai bersangkutan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah yang tertuang dalam Renstra serta mendukung Visi, Misi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana. Untuk mendukung tercapainya target didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.391.456,- realisasi sebesar Rp. 1.258.000,- capaian kinerja keuangan 90,41% efisiensi sebesar Rp.133.456,- (9,59.%). Pencapaian indikator ini pada tahun 2020 sebesar 81,86, target tahun 2021 sebesar 82, realisasi tahun 2021 sebesar 76,24. Capaian kinerja sebesar 76,24 bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 81,86 tampak mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah dalam Renstra (tahun 2021) sebesar 82 telah tercapai 92,98%. Pencapaian kinerja yang kurang mencapai target diakibatkan oleh pegawai dinas koperasi UKM dan perdagangan kurang menyadari isi AKIP dan peranan dokumen perencanaan dalam proses pelaksanaan kegiatan dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil yang diukur oleh indikator yang baik dan benar.

Pencapaian predikat AKIP dinas dalam kurun waktu 2017-2021 ada di Tabel 3.15

Tabel 3.15
Target, Realisasi dan Kinerja Dinas untuk Indikator Tujuan
Predikat AKIP Dinas

Item	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Target	78,05	79	80	81	82
Realisasi	78,08	79,33	80,00	81,86	76,24
Kinerja	100,04%	100,42%	100,00%	101,06%	92,98%

Grafik 3.12
Grafik Perbandingan Target, Realisasi dan Kinerja untuk Indikator Tujuan
Predikat AKIP

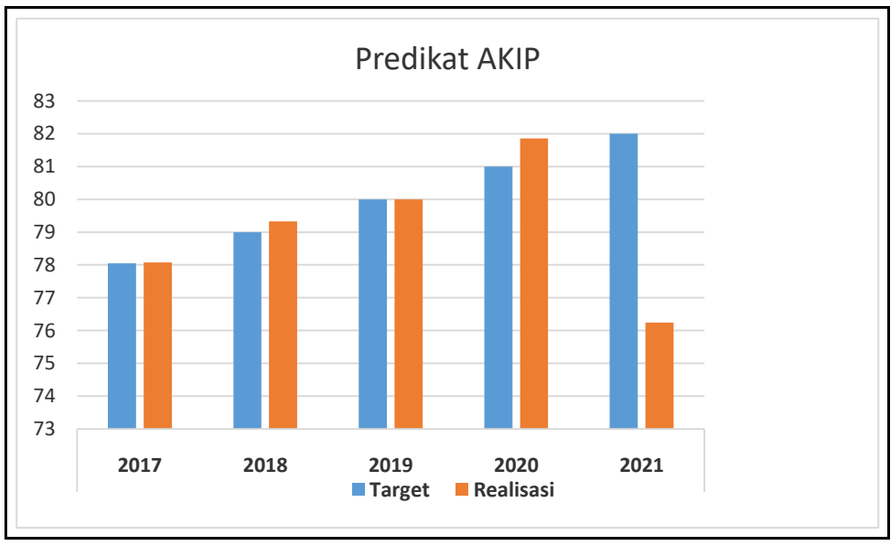

Jika melihat grafik di atas, terlihat bahwa predikat AKIP Dinas cenderung mencapai target menunjukkan kinerja Dinas yang relatif baik untuk indikator Predikat AKIP ini.

Sasaran 3 : Meningkatnya tata Kelola Keuangan yang Efektif dan Efisien

Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien adalah merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan efektif dan efisien memberikan dampak terhadap penggunaan anggaran tepat guna dan hasil guna sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan roda organisasi sehingga memberikan dampak terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan dan isu strategis yang ada di masyarakat. Untuk mencapai sasaran ini dengan indikator persentase realisasi belanja langsung dan tidak langsung, realisasi tahun 2021 sebesar 91,40% target tahun 2021 sebesar 91,80%, capaian kinerja sebesar 99,56% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar : 93,8%, Belanja Langsung (BL) : 77,86%. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 4.926.506,- realisasi sebesar Rp. 1.344.950,- capaian kinerja keuangan sebesar 27,3%. terjadi efisiensi sebesar Rp. 3.581.556,- (72,7%).

Capaian kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi sebesar 88,7%. Mengalami kenaikan sebesar 2,7% dan jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah dalam renstra sebesar 91,80 % telah melebihi target sebesar 99,56%. Kinerja ini didukung pelaksanaan dan administrasi pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur dan tata kelola yang baik dan benar serta didukung efisiensi anggaran dari proses penawaran serta harga di lapangan yang lebih rendah dari pagu, serta perubahan kondisi kepegawaian akibat peraturan baru yang berdampak pada jumlah pegawai yang mempengaruhi realisasi anggaran utamanya pada Belanja Tidak Langsung.

Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan berdasarkan atas tujuan dan sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Capaian kenerja atas dasar tujuan:

   Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan didalam Renstra menetapkan 3 Tujuan yaitu :

   1. Terwujudnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB didukung oleh 2 sasaran, target tahun 2021 7,91% realisasi sebesar 14,25% (sementara) capaian kinerja sebesar 180,15%.
   2. Terwujudnya Peningkatan Perdagangan di Kabupaten Badung didukung oleh 1 sasaran diukur dengan indikator Nilai Ekpor UMKM Kabupaten Badung target tahun 2021 US$. 57.260.445,10 dengan realisasi sebesar US$. 46.849.699,86 Capaian kinerja sebesar 81,82.%.
   3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang good government didukung oleh 3 sasaran target 91,8% realisasi sebesar 91,4%. Capaian Kinerja sebesar 99,56%.

b. Capaian kinerja atas dasar sasaran.

   Dinas Koperasi UKM dan perdagangan di dalam Renstra menetapkan 6 (enam) sasaran yaitu :

   1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas UMKM didukung oleh 1 indikator dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 601,72 %.
   2. Meningkatnya Koperasi Aktif dan Sehat didukung oleh 2 indikator dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 93,93%.
   3. Meningkatnya Kontribusi sektor Perdagangan di Kabupaten Badung didukung 2 indikator dengan rata rata capaian kinerja sebesar 131,9%.
   4. Meningkatnya disiplin pegawai didukung oleh 1 indikator capaian kinerja sebesar 100 %
   5. Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 1 indikator capaian kinerja sebesar 92,98 %
   6. Meningkatnya tata kelola keuangan yang efektif dan efisien didukung 1 indikator capaian kinerja sebesar 99,56 %

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Anggaran yang berbasis kinerja merupakan suatu yang sangat penting dilaksanakan sebagai upaya optimalisasi penggunaanya berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan yaitu efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel. Dalam menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan tetap mengacu pada Money Follow Program sehingga anggaran yang diberikan tepat guna dan sasaran untuk memecahkan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh lembaga dan instansi sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah baik daerah maupun pusat. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tahun anggaran 2019 diberikan anggaran untuk mendukung pencaian indikator melalui beberapa program yang dijabarkan kedalam beberapa kegiatan baik yang bersifat utama maupun penunjang dalam pelaksanaan urusan wajib bukan dasar dan pilihan.

Sumber dana untuk pembiayaan semua kegiatan tersebut diatas adalah dari APBD Kabupaten Badung tahun 2021 sebesar Rp. 12.086.004.819,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 10.027.559.692,- dan belanja langsung sebesar Rp.2.058.445.127 Belanja langsung terdiri dari : Belanja Barang dan Jasa Rp.2.058.445.127,- Dari anggaran diatas, realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.405.747.867,- (93,8%) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.10.027.559.692,- Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.058.445.127 realisasi sebesar Rp. 1.580.302.995,- (76,77%) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 2.058.445.127, dengan realisasi sebesar Rp. 1.580.302.995,- (76,77%). Dari Total Anggaran sebesar Rp.12.136.004.819 realisasinya adalah sebesar Rp. 10.986.050.862,- dengan persentase realisasinya sebesar 90,52%. Dalam rangka pengelolaan keuangan pada dinas koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2021 terbagi atas belanja tidak langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) terjadi efisensi atau pengembalian anggaran sebesar Rp. 1.099.953.957 atau 9,06% (Tabel Realisasi Anggaran Terlampir).

Terjadinya efisiensi dalam penggunaan anggaran diakibatkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Adanya beberapa sub. Kegiatan dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan diakibatkan oleh adanya rasionalisasi.
2. Adanya efisiensi belanja barang dan jasa akibat penawaran dalam proses pengadaan serta harga barang yang dibutuhkan dibawah dari pagu yang dianggarkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Pada belanja tidak langsung terjadi pengembalian ke kas daerah terkait dengan dana cadangan akibat perubahan kebutuhan kepegawaian.

C. P E N U T U P

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang di percayakan kepada setiap instansi pemerintah, guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

LKjIP Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang : Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Analisa Capaian Kinerja Tujuan

Pada tahun 2021 capaian kinerja dari tujuan 1 (satu) dengan indikator meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB capaian kinerjanya sebesar 180,15 %. Tujuan 2 (dua) dengan indikator Nilai ekspor UMKM Kabupaten Badung capaian kinerjanya 81,82 % dan Tujuan 3 (tiga) dengan 1 (satu) indikator Persentase realisasi belanja langsung dan tidak langsung capaian kinerja 99,56 %. Jadi rata-rata capaian kinerja dari ke 3 (tiga) tujuan adalah 120,51 **%**

Analisa Capaian Kinerja Sasaran

Dari 6 sasaran rata-rata capaian masing-masing sasaran adalah sbb: Sasaran 1 dengan 1 indikator dengan capaian kinerjanya sebesar 601,72 %. Sasaran 2 dengan 2 indikator rata-rata capaian kinerjanya 93,93%. Sasaran 3 didukung oleh 2 indikator capaian kinerjanya sebesar 131,9 %. Sasaran 4 didukung oleh 1 indikator capaian kinerjanya sebesar 100 %. Sasaran 5 dengan 1 indikator capaian kinerjanya 92,98%. Sasaran 6 dengan 1 indikator capaian kinerjanya 99,56%

Dari 10 indikator, ada 2 indikator yang tidak dipakai yaitu pertumbuhan usaha mikro menjadi kecil serta pertumbuhan usaha kecil menjadi menengah dengan alasan tidak ada program yang mendukung dan karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dimana terjadi perubahan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Dengan aturan baru ini banyak usaha mikro tidak bisa naik menjadi usaha kecil dan banyak usaha kecil tidak bisa naik menjadi usaha menengah

Dari 8 indikator yang dipakai rata-rata capaian kinerjanya sebesar 140,01%. Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran tak lepas dari upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsi serta tujuan dibentuknya organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2021. Namun tidak dipungkiri bahwa masih ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam berkinerja, baik kinerja pelaksanaan kegiatan maupun pencapaian tujuan dan sasaran

contohnya adalah Pandemi Covid 19 yang menyebabkan kelesuan ekonomi. Pemasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sehingga capaian kinerja pendukung tujuan dan sasaran diukur berdasarkan indikator kinerja ada yang tidak sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan baik yang bersifat internal maupun ekternal dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi anggota, kurangnya kemampuan SDM, pengurus, pengawas, dalam pengelolaan Koperasi yang sehat
2. Masih terbatasnya kemampuan UMKM dalam penggunaan teknologi untuk pengembangan usahanya.
3. Rendahnya kesadaran pelaku UMKM untuk mengikuti hal-hal yang bersifat kewirausahaan, pemberdayaan, pengembangan serta keikutsertaannya dalam ajang pameran dan promosi.
4. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan UMKM untuk memanfaatkan peluang pasar serta kurangnya kreatifitas dan inovasi untuk menciptakan produk.
5. Kurangnya kesadaran para pedagang/pemilik UTTP untuk melaksanakan tera ulang
6. Adanya pandemi Covid-19 yang membuat daya beli masyarakat menurun. Hal ini berimbas pada sejumlah UMKM sehingga banyak UMKM skala menengah turun kelas ke skala kecil dan dari skala kecil ke skala mikro

SOLUSI PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi solusi permasalahan di lapangan adalah :

1. Melaksanakan penyuluhan, peningkatan pengetahuan dalam perkoperasian yang mengacu pada azas-azas dan prisip-prinsip pengelolaan koperasi yang sehat dan mandiri
2. Meningkatkan kemampuan UKM dalam mengakses teknologi melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat pemberdayaan, pengembangan dan Ilmu teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dan memberikan bantuan peralatan untuk usaha UKM.
3. Meningkatkan jaringan pemasaran melalui kegiatan temu usaha dan konsultasi antar UKM, dan memfasilitasi pelaksanaan pameran/promosi usaha baik lokal, nasional bahkan internasional.
4. Menyiapkan Klinik UMKM sebagai tempat UMKM Badung mendapatkan informasi dan pendampingan dalam pengembangan usaha untuk menciptakan produk yang berdaya saing.
5. Memberikan bantuan dana (stimulus UMKM) sehingga UMKM bisa bertahan menghadapi kelesuan ekonomi akibat Pandemi Covid 19.
6. Memberikan perlindungan kepada konsumen dengan pelayanan tera /tera ulang terjadwal dan bersifat insedental melalui pelayanan tera keliling

L A M P I R A N

TABEL REALISASI TAHUN 2021

NO.	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pertumbuhan UMKM baru	Program Pengembangan UMKM			**305.826.000**	**193.792.554**	**112.033.446**
			1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	305.826.000	193.792.554	112.033.446
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			**148.211.953**	**144.557.338**	**3.654.615**
			1 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro bagi usaha mikro dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro	148.211.953	144.557.338	3.654.615
2	Persentase Usaha Mikro menjadi Kecil	Program Pengembangan UMKM					
3	Persentase Usaha Kecil menjadi Menengah	Program Pengembangan UMKM					
4	Persentase Koperasi aktif	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			**462.748.640**	**417.719.938**	**45.028.702**
			1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	314.536.687	273.162.600	41.374.087
			2 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten / Kota	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM	148.211.953	144.557.338	3.654.615
5	Persentase Koperasi Sehat	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi			**130.059.000**	**111.529.075**	**18.529.925**
			1 Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP koperasi kewenangan kabupaten / kota	130.059.000	111.529.075	18.529.925

NO.	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			**36.808.823**	**3.324.400**	**33.484.423**
			1 Pengendalian harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten / Kota	1 Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem perdagangan	36.808.823	3.324.400	33.484.423
7	Persentase UTTP yang di Tera	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			**371.499.152**	**343.418.408**	**28.080.744**
			1 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	1 Pelaksanaan metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang	371.499.152	343.418.408	28.080.744
8	Persentase Kehadiran pegawai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			**10.772.745.242**	**9.913.663.537**	**859.081.705**
			1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.027.559.692	9.405.747.867	621.811.825
			2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3.509.710	3.149.500	360.210
				2 Penyediaan peralatan rumah tangga	4.123.043	0	4.123.043
				3 Penyediaan bahan logistik kantor	30.475.000	30.375.000	100.000
				4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.327.663	4.217.600	19.110.063 0
				5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	37.015.000	33.170.000	3.845.000 0
			3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	81.115.559	76.278.155	4.837.404
				2 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.835.075	12.629.987	13.205.088
				3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.800.000	1.080.000	3.720.000
			4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per Orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.161.000	76.235.428	7.925.572
				2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	382.353.500	262.855.000	119.498.500
				3 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	68.470.000	7.925.000	60.545.000

NO.	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Predikat AKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	**1.391.456** 1.391.456	**1.258.000** 1.258.000	**133.456** 133.456
10	Persentase realisasi Belanja langsung dan tidak langsung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**4.926.506** 4.926.506	**1.344.950** 1.344.950	**3.581.556** 3.581.556

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kabupaten Badung

I Made Widiana,S.Sos,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650310 198602 1 004